

DISERTASI

**KLIENTELISME PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL
DI KOTA TANGERANG 2018**



**ASEP FERRY BASTIAN
NPM: 216701519001**

**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM DOKTOR ILMU POLITIK
JAKARTA
2026**

DISERTASI

**KLIENTELISME PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL
DI KOTA TANGERANG 2018**



**ASEP FERRY BASTIAN
NPM: 216701519001**

Disertasi ini Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Politik

**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM DOKTOR ILMU POLITIK
JAKARTA
2026**

PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa:

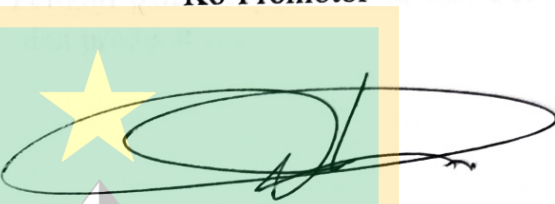
1. Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik Doktor, baik di Universitas Nasional maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, dengan arahan Tim Promotor.
3. Di dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis yang telah dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan judul buku/tulisan dalam catatan kaki dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 27 Januari 2026
Yang membuat Pernyataan,



Asep Ferry Bastian
NPM. 216701519001

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN DISERTASI
(TERBUKA)**

Judul Disertasi	
KLIENTELISME PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL DI KOTA TANGERANG 2018	
Promotor	Ko-Promotor
 Prof. Dr. Lili Romli, M.Si	 Drs. Firdaus Syam, MA., Ph.D
 Dr. TB Massa Djafar, M.Si Tanggal : _____	
Nama : Asep Ferry Bastian NPM : 216701519001	

HASIL UJIAN PROMOSI

Disertasi yang ditulis oleh **ASEP FERRY BASTIAN**, pada Program Doktor Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional dengan judul:

KLIENTELISME PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL DI KOTA TANGERANG 2018

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 27 Januari 2026 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai dan predikat

Jakarta, 27 Januari 2026
TIM PENGUJI,

KETUA SIDANG : Prof. Dr. Suryono Efendi, S.E., M.B.A., M.M.

PROMOTOR : Prof. Dr. Lili Romli, M.Si

KO-PROMOTOR : Drs. Firdaus Syam, M.A., Ph.D

PENGUJI : Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A

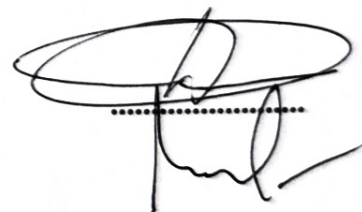
PENGUJI : Dr. TB. Massa Djafar, M.Si

PENGUJI AHLI : Prof. Dr. Musni Umar

**TANDA
TANGAN**











ABSTRAK

Universitas Nasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Doktor Ilmu Politik

- A. Nama : Asep Ferry Bastian
B. NPM : 216701519001
C. Judul : Klientelisme Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah
Calon Tunggal Di Kota Tangerang 2018
D. Isi Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Klientelisme Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal di Kota Tangerang 2018. Fokus utama penelitian ini adalah (1) Menganalisis koalisi partai politik pengusung pasangan calon tunggal; (2) Menganalisis terbentuknya Klientelisme dan *Broker* dalam Pilkada pasangan calon tunggal; (3) Menganalisis Klientelisme partai politik dalam Pilkada pasangan calon tunggal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena Klientelisme dalam konteks politik lokal. Sumber dan teknik pengumpulan data diperoleh melalui tinjauan kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Koalisi partai politik pengusung pasangan calon tunggal; (a) biaya pendanaan Pilkada besar, (b) ambang batas syarat pencalonan tinggi, (c) tidak ada larangan mengusung calon tunggal, (d) pertimbangan hasil survei petahana unggul, (e) keberhasilan petahana dalam memimpin daerah dan pengaruhnya terhadap dukungan partai politik, (f) terbentuknya partai koalisi pengusung calon tunggal, (g) bentuk kepartaian kartel dalam pilkada Kota Tangerang 2018, (h) dampak kartelisasi politik dalam pilkada kota tangerang 2018. (2) Terbentuknya klientelisme dan *broker* dalam Pilkada pasangan calon tunggal; (a) dinamika klientelisme dalam relasi elite politik lokal, (b) dinamika klientelisme partai politik dalam Pilkada Kota Tangerang 2018, (c) *Broker Politik*. (3) Klientelisme partai politik dalam Pilkada pasangan calon tunggal; (a) praktik klientelisme Pilkada Kota Tangerang, (b) bentuk klientelisme partai politik: transaksi “uang mahar”, (c) peran aktor partai politik dalam klientelisme, (d) pragmatisme dalam seleksi/rekrutmen kandidat, (e) patronase politik dan jaringan. Penelitian ini mengajukan konsep teoretis: (1) *Party Buying*, yaitu praktik jual beli dukungan politik antara kandidat kepala daerah dan partai politik melalui “uang mahar” yang dimediasi oleh *broker* politik (tim sukses) untuk memperoleh surat rekomendasi pencalonan Pilkada. (2) Teori partai politik kartel membuktikan praktik klientelisme dan partai kartel saling menguatkan dalam satu rezim politik lokal; klientelisme manifestasi operasional partai kartel. (3) *Candidate–Political Party Brokerage*, yaitu peran *broker* politik yang memediasi relasi antara kandidat kepala daerah dan pimpinan partai politik dalam memperoleh surat rekomendasi pencalonan Pilkada.

Kata kunci: klientelisme, partai politik kartel, *broker* politik, calon tunggal, Pilkada.

ABSTRACT

National University

Faculty of Social and Political Sciences Doctoral Program in Political Science

- A. Name : Asep Ferry Bastian
B. NPM : 216701519001
C. Title : *Party Clientelism in the 2018 Single-Candidate
Regional Head Election in Tangerang City*
D. Abstract Content :

This research aims to examine and analyze Political Party Clientelism in the 2018 Single-Candidate Regional Head Election (Pilkada) in Kota Tangerang. The main focus of this research is to: (1) analyze the coalition of political parties supporting the single-candidate pair; (2) analyze the formation of clientelism and political brokerage in the single-candidate Pilkada; and (3) analyze political party clientelism in the single-candidate Pilkada. This research employs a qualitative method with a case study approach, allowing for an in-depth analysis of clientelism phenomena within the context of local politics. Data sources and collection techniques include literature review, interviews, observation, and documentation. Data validity is ensured through prolonged engagement, increased research rigor, and triangulation. The research reveals that: (1) The coalition of political parties supporting the single-candidate pair is shaped by: (a) high campaign financing costs in local elections; (b) high nomination threshold requirements; (c) the absence of legal prohibitions on nominating a single candidate; (d) survey considerations indicating the incumbent's electoral advantage; (e) the incumbent's leadership performance and its influence on party support; (f) the formation of a coalition of parties supporting a single candidate; (g) the manifestation of cartel party characteristics in the 2018 Pilkada of Kota Tangerang; and (h) the impact of political cartelization in the 2018 Pilkada of Kota Tangerang. (2) The formation of clientelism and political brokers in the single-candidate Pilkada involves: (a) the dynamics of clientelism in relations among local political elites; (b) the dynamics of political party clientelism in the 2018 Pilkada of Kota Tangerang; and (c) the role of political brokers. (3) Political party clientelism in the single-candidate Pilkada is reflected in: (a) clientelistic practices in the Pilkada of Kota Tangerang; (b) forms of political party clientelism, particularly the transaction of "dowry money" (uang mahar); (c) the role of political party actors in clientelism; (d) pragmatism in candidate selection and recruitment; and (e) political patronage and networks. This research proposes the following theoretical concepts: (1) Party Buying, defined as the practice of buying and selling political support between local head candidates and political parties through "dowry money," mediated by political brokers (campaign teams) to obtain nomination recommendation letters for the Pilkada. (2) Cartel Party Theory, which demonstrates that clientelistic practices and cartel parties mutually reinforce each other within a local political regime, with clientelism serving as the operational manifestation of cartel parties. (3) Candidate–Political Party Brokerage, referring to the role of political brokers who mediate the relationship between local head candidates and political party leadership in obtaining nomination recommendation letters for the Pilkada.

Keywords: *clientelism, cartel political parties, political brokers, single candidate, regional elections.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN DISERTASI (TERBUKA).....	iii
HASIL UJIAN PROMOSI DOKTOR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
GLOSARI	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	4
B. Masalah Penelitian.....	18
B.1. Koalisi Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Tunggal	19
B.2. Terbentuknya Klientelisme dan Broker dalam Pilkada Pasangan Calon Tunggal	23
B.3. Klientelisme Partai Politik dalam Pilkada Pasangan Calon Tunggal	28
C. Pertanyaan Penelitian.....	35
D. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	35
D.1. Tujuan Penelitian	35
D.2. Signifikansi Penelitian	36
E. Orisinalitas Penelitian	39
F. Kerangka Teori dan Kajian Literatur	40
F.1. Kerangka Teori	40
F.1.1. Teori Klientelisme	40
F.1.2. Teori Partai Politik Kartel	54
F.1.3. Teori Broker	62

F.2. Kajian Literatur.....	68
G. Metode Penelitian	77
G.1. Fokus Penelitian.....	84
G.2. Sumber Data.....	84
G.2.1. Data Primer.....	85
G.2.2. Data Sekunder	85
G.3. Instrumen Penelitian	85
G.4. Teknik Pengumpulan Data.....	86
G.4.1. Metode Wawancara.....	86
G.4.2. Metode Observasi.....	87
G.4.3. Metode Dokumentasi.....	87
G.5. Penentuan Informan.....	88
G.6. Uji Keabsahan Data	90
G.6.1. Perpanjangan Pengamatan.....	91
G.6.2. Peningkatan Ketekunan.....	91
G.6.3. Triangulasi.....	91
G.7. Teknik Analisis Data.....	92
G.7.1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	93
G.7.2. Penyajian Data (<i>Display Data</i>).....	93
G.7.3. Verifikasi dan Kesimpulan (<i>Conclusion Drawing and Verification</i>).....	93
H. Ruang Lingkup Penelitian.....	94
I. Sistematika Penulisan	94
BAB II DINAMIKA POLITIK PILKADA KOTA TANGERANG 2018.....	98
A. Gambaran Umum Kota Tangerang	100
B. Kondisi Politik dan Dinamika Pilkada Pasangan Calon Tunggal.....	104
C. Profil Tiga Studi Partai Politik di Kota Tangerang.....	114
C.1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tangerang	114
C.2. Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Tangerang	117
C.3. Partai Demokrat Kota Tangerang	121
D. Sistem Pilkada Pasangan Calon Tunggal.....	123

E.	Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon.....	134
E.1.	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.....	137
E.2.	Pengumuman Pendaftaran Calon.....	139
E.3.	Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon	142
E.4.	Penelitian Persyaratan Pasangan Calon	147
E.5.	Laporan LHKPN Pasangan Calon	151
E.6.	Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan	155
F.	Profil Pasangan Calon Pilkada Kota Tangerang	157
G.	Kampanye Pasangan Calon.....	163
G.1.	Visi, Misi dan Program Pasangan Calon	168
G.2.	Pelaporan Dana Kampanye.....	174
H.	Gerakan Kampanye Kotak Kosong.....	178
I.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.....	182
J.	Penetapan Pasangan Calon Terpilih.....	185
BAB III KOALISI PARTAI POLITIK PENGUSUNG PASANGAN CALON TUNGGAL.....		189
A.	Biaya Pendanaan Pilkada Besar.....	191
B.	Ambang Batas Syarat Pencalonan Tinggi.....	198
C.	Tidak Ada Larangan Mengusung Calon Tunggal.....	210
D.	Pertimbangan Hasil Survei Petahana Unggul	217
E.	Keberhasilan Petahana dalam Memimpin Daerah dan Pengaruhnya terhadap Dukungan Partai Politik.....	224
F.	Terbentuknya Partai Koalisi Pengusung Calon Tunggal	241
G.	Bentuk Kepartaian Kartel dalam Pilkada Kota Tangerang 2018.....	250
H.	Dampak Kartelisasi Politik dalam Pilkada Kota Tangerang 2018.....	253
H.1.	Implikasi Terhadap Demokrasi Lokal	254
H.2.	Terjalinnnya Relasi dan Komitmen Politik antara Pimpinan Partai dan Kandidat.....	256
H.3.	Terjadinya Perdebatan di Internal Partai Politik tentang Penentuan Calon Pilkada 2018.....	264

H.4. Terjadinya Penetapan Pasangan Calon Petahana dan Rekomendasi Partai Politik.....	276
H.5. Terbentuknya Relasi antara Elite Partai dan Kandidat Terpilih demi Menjaga Stabilitas Politik dan Pemerintahan	289
BAB IV TERBENTUKNYA KLIENTELISME DAN <i>BROKER</i> DALAM PILKADA PASANGAN CALON TUNGGAL	298
A. Dinamika Klientelisme dalam Relasi Elite Politik Lokal	300
B. Dinamika Klientelisme Partai Politik dalam Pilkada Kota Tangerang 2018.....	307
B.1. Komunikasi Elite Partai dengan Kandidat	311
B.2. Lobi Elite Partai dengan Kandidat	320
B.3. Negosiasi Elite Partai dengan Kandidat	326
C. <i>Broker</i> Politik	329
C.1. Pembentukan Tim Pemenangan/Sukses	331
C.2. Tim Pemenangan/Sukses Pasangan Calon	333
C.2.1. Tim Lingkaran Dalam dan Jaringan Relawan Kandidat	334
C.2.2. Konsolidasi Tim dan Jaringan Relawan	339
C.3. Peran Tim Pemenangan/Sukses dalam Pilkada	342
C.3.1. Komunikasi, Lobi, Negosiasi Tim Pemenangan dan Partai Politik	347
C.3.2. Mengakomodasi Kepentingan Elite Partai Politik	361
C.4. Peran Tim Jaringan Relawan	363
BAB V KLIENTELISME PARTAI POLITIK DALAM PILKADA PASANGAN CALON TUNGGAL	373
A. Praktik Klientelisme Pilkada Kota Tangerang	375
A.1. Klientelisme Partai Politik PDIP	375
A.2. Klientelisme Partai Politik Gerindra	381
A.3. Klientelisme Partai Politik Demokrat	384
B. Bentuk Klientelisme Partai Politik: Transaksi “Uang Mahar”	389
B.1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	391
B.2. Partai Gerakan Indonesia Raya	394
B.3. Partai Demokrat	396

C. Peran Aktor Partai Politik dalam Klientelisme	399
C.1. Penjaringan Bakal Calon Partai Politik.....	406
C.2. Survei Bakal Calon Partai Politik	412
D. Pragmatisme Dalam Seleksi/Rekrutmen Kandidat	419
D.1. Formalitas Pendaftaran Calon dalam Pilkada	420
D.2. Institusionalisasi Partai Politik.....	426
D.3. Kaderisasi Calon Pemimpin di Partai Politik Masih Terbatas	437
D.4. Popularitas dan <i>Elektabilitas</i> Pasangan Calon Tinggi	447
D.5. Rasionalitas Dalam Keputusan Politik.....	458
E. Patronase Politik dan Jaringan	466
BAB VI PENUTUP	473
A. Kesimpulan	474
B. Implikasi Teoretis	479
DAFTAR PUSTAKA	491
LAMPIRAN.....	537



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Distribusi Non Terprogram: Ringkasan Kerugian	45
Tabel 1.2 Harapan <i>Broker</i>	67
Tabel 1.3 Model Jumlah Pengeluaran Dana Kampanye	71
Tabel 1.4 Tingkat Politik Uang Di Pilkada Di Seluruh Indonesia, 2006-2015.....	73
Tabel 1.5 Daftar Informan Kunci (<i>Key Informant</i>)	89
Tabel 2.6 Kecamatan, Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kota Tangerang	102
Tabel 2.7 Perolehan Suara Partai Politik di Kota Tangerang Hasil Pemilu 2014	105
Tabel 2.8 Jumlah Kursi Partai Politik di DPRD Kota Tangerang Hasil Pemilu 2014	106
Tabel 2.9 Struktur dan Komposisi DPC PDIP Kota Tangerang Masa Bakti 2015- 2020.....	116
Tabel 2.10 Susunan Personalia Pengurus DPC Partai Gerindra Kota Tangerang 2017.....	120
Tabel 2.11 Susunan Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Tangerang Masa Bakti 2012-2017.....	122
Tabel 2.12 Jadwal Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon	135
Tabel 2.13 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pilkada Kota Tangerang 2018 ...	138
Tabel 2.14 Daftar Surat Rekomendasi Pimpinan Partai Politik	150
Tabel 2.15 Jadwal Masa Kampanye Pilkada Kota Tangerang	165
Tabel 2.16 Program Melanjutkan Pembangunan Kota Tangerang	172
Tabel 2.17 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon	176
Tabel 4.18 Evolusi Peran <i>Broker</i>	360

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kota Tangerang	101
Gambar 6.2 Model Proposisi <i>Party Buying</i> (Pembelian Partai)	480



DAFTAR SINGKATAN

AMPI	: Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia
APBD	: Pendapatan dan Belanja Daerah
APK	: Alat Peraga Kampanye
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BAMUS	: Badan Musyawarah
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BSD	: Bumi Serpong Damai
DAPIL	: Daerah Pemilihan
DISKOMINFO	: Dinas Komunikasi dan Informatika
DKM	: Dewan Kemakmuran Masjid
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPPPP	: Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPS	: Daftar Pemilih Sementara
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah
FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama
GARUDA	: Gerakan Rakyat Dukung Arief
GERINDRA	: Partai Gerakan Indonesia Raya
GOLKAR	: Partai Golongan Karya
GP	: Gerakan Pemuda
HANURA	: Partai Hati Nurani Rakyat
HIPMI	: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
HUMAS	: Hubungan Masyarakat
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
IPBA	: Indonesian Property and Bank Award
JKK	: Jaringan Kotak Kosong
KDI	: Kepala Daerah Inovatif
KIP	: Komisi Independen Pemilihan
KKN	: Korupsi Kolusi Nepotisme
KNPI	: Komite Nasional Pemuda Indonesia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemilhan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KTA	: Kartu Tanda Anggota
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KWARCAB	: Kwartir Cabang
LADK	: Laporan Awal Dana Kampanye
LHKPN	: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

LKS	: Lembaga Kerja Sama
LPM	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LPPDK	: Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
LPSDK	: Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MK	: Mahkamah Konstitusi
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MPC	: Majelis Pertimbangan Cabang
MTP	: Majelis Tinggi Partai
MUSCAB	: Musyawarah Cabang
NASDEM	: Nasional Demokrat
NU	: Nahdlatul Ulama
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PAC	: Pimpinan Anak Cabang
PAN	: Partai Amanat Nasional
PANWASLU	: Panitia Pengawas Pemilu
PD	: Partai Demokrat
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PEMILU	: Pemilihan Umum
PERKIM	: Dinas Perumahan dan Permukiman
PERMIAS	: Presiden Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika
PERSI	: Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
PILBUP	: Pemilihan Bupati
PILGUB	: Pemilihan Gubernur
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PILWAKO	: Pemilihan Wali Kota
PK	: Pengurus Kecamatan
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
Plh	: Pelaksana Harian
Plt	: Pelaksana Tugas
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPDP	: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PPS	: Panitia Pengumutan Suara
RAKERCAB	: Rapat Kerja Cabang
RAKERDA	: Rapat Kerja Daerah
RAKERNAS	: Rapat Kerja Nasional
RAKERWIL	: Rapat Kerja Wilayah
RANHAM	: Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
RAPIMDA	: Rapat Pimpinan Daerah
RKDK	: Rekening Khusus Dana Kampanye
RTLH	: Rumah Tidak Layak Huni

SARA	: Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
SATLAK	: Satuan Pelaksana
SD	: Sekolah Dasar
SEKBER	: Sekretariat Bersama
SEKJEN	: Sekreraris Jenderal
SILON	: Sistem Informasi Pencalonan
SK	: Surat Keputusan
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
TKPK	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TPID	: Tim Penanggulangan Inflasi Daerah
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
UNIS	: Universitas Islam Syekh-Yusuf
UU	: Undang-Undang

DAFTAR NAMA-NAMA:

AA	: Aji Aradea
AB	: Ahmad Basarah
AM	: Ahmad Muzani
AM	: Agus Muslim
AP	: Andri Permana
ARW	: Arief Rachadiono Wismansyah
AS	: Andra Soni
AW	: Ananta Wahana
BB	: Banani Bahrul
BHK	: Baihaki
DJM	: Desmond Junaidi Mahesa (Alm.)
DRM	: Dirman
EH	: Edy Hamdi
FN	: Fadlun
FY	: Fety
GW	: Gatot Wibowo
HK	: Hasto Kristiyanto
HP	: Hince Panjaitan
JPB	: Juliari Peter Batubara
NBS	: Nurseto Budi Santoso
PP	: Pontjo Prayogo
SDA	: Sufmi Dasco Ahmad
SG	: Sugianto
SP	: Sanusi Pane
SPR	: Suparmi
SRD	: Sachrudin
TS	: Turidi Susanto

GLOSARI

Aktor Politik	: Pihak yang terlibat dan berperan dalam proses politik dan kekuasaan.
Bakal Calon	: Seseorang yang belum ditetapkan secara resmi sebagai calon dalam pemilihan.
Bumbung Kosong	: Simbolik untuk pilihan “penolakan” terhadap calon tunggal.
Calon dalam politik	: Seseorang yang secara resmi diusung atau mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik, seperti Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, anggota legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), atau anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah).
Elite Politik	: Kelompok berpengaruh yang mengendalikan keputusan dan sumber daya politik.
Kandidat	: Seseorang yang telah resmi ditetapkan sebagai calon dalam pemilihan.
Klientalistik	: Bersifat patron–klien; pola pertukaran asimetris di mana imbalan diberikan untuk memperoleh dukungan atau loyalitas politik.
Klientelisme	: Hubungan timbal balik yang asimetris antara pihak yang berkuasa dan pihak yang membutuhkan, ditandai oleh pertukaran imbalan dengan dukungan politik, bersifat personal, dan biasanya informal.
Klientelistis	: Bersifat atau berperilaku membangun hubungan patron–klien, di mana dukungan atau loyalitas diperoleh melalui pemberian imbalan materi, jasa, atau keuntungan tertentu.
Kolom Kosong	: Ruang kosong di surat suara dalam pemilihan calon tunggal.
Kotak Kosong	: Pilihan tandingan terhadap calon tunggal di surat suara.
Mahar Politik	: Uang atau bentuk lain yang diberikan kepada partai untuk mendapatkan dukungan pencalonan.
Politik Mahar	: Praktik pemberian uang oleh calon kepada partai politik sebagai syarat tidak resmi untuk mendapatkan dukungan pencalonan. Praktik ini mencerminkan relasi transaksional dan tidak didasarkan pada meritokrasi.
Tim Pemenangan Pasangan Calon	: Tim yang mendukung dan memenangkan pasangan calon dalam pemilu.
Tim Sukses	: Tim yang bertugas memenangkan calon dalam pemilu.
Uang Mahar	: Sejumlah uang yang diberikan sebagai syarat untuk maju sebagai calon dalam pemilu.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Narsumber Wawancara Langsung.....	537
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	539

